

DEMOKRASI DALAM ISLAM PANDANGAN AL-MAUDUDI

Bambang Saiful Ma'arif**

Abstrak

Abu al-A'la al-Maududi merupakan salah satu pemikir muslim dari kawasan anak benua, India dan Pakistan. Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga terpelajar, Al-Maududi sejak kecil dididik dengan pendidikan agama disamping pendidikan umum, termasuk bahasa Arab dan Urdu.

*Karir Al-Maududi dimulai dari jurnalistik dan mencapai puncaknya sebagai pemimpin editor dua surat kabar kenamaan, yaitu **Muslim** dan **al-Jami'ati 'Ulama-i. Hind.** Empat tahun kemudian ia menjadi pemimpin majalah **Turjuman Al-Qur'an**, yang berorientasikan kebangkitan al-Islam.*

Selain itu, Al-Maududi muda ini tertarik pula dengan persoalan politik. Ini dapat dimaklumi karena situasi dan suhu politik yang terjadi di negerinya, mau atau tidak mau, dan langsung atau tidak langsung, mempengaruhi dan mancuri perhatiannya. Berkat perkenalannya dengan Muhammad Ali, Muhammad Iqbal, dan aktivis lainnya, semakin memantapkan pembentukan kedewasaan berfikir dan ketajaman analisisnya dalam soal politik. Oleh karena itu, dari tangannya lahir pemikiran politik Islam.

Bagi al-Maududi, negara Islam adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Ajaran Islam yang serba mencakup itu tak dapat dipraktekkan tanpa negara Islam. Alasannya, negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran agama. Niat mencari kekuasaan dalam rangka menegakkan agama Allah adalah amal saleh dan jangan dicampur adukkan dengan ambisi kekuasaan.

Konsekuensi logis dari teori politik Islam tersebut. Al-Maududi mengajukan rumusan baru mengenai arti demokrasi yang dipersepsi oleh Barat selama ini. Bagi dia tidak seorangpun yang dapat mengklaim, memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah dan selain Dia adalah hamba-Nya. Atas dasar itu, dia mengajukan istilah "theodemokrasi", yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini, rakyat diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah

Kata Kunci : Theodemokrasi, teori politik Islam

** Bambang Saiful Ma'arif, Drs., M.Si., adalah dosen tetap Fakultas Ushuluddin UNISBA

1 Pengantar

Kebangkitan dunia Islam yang ditandai dengan ‘Revolusi Iran’ 1979 menjadi sesuatu fenomena yang monumental dan legendaris. Peristiwa tersebut telah mengilhami banyak pergerakan di dunia Islam lainnya, baik di Afrika, Asia maupun di Eropah.

Di Asia, Indonesia dan Malaysia diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran pada dunia Islam. Namun untuk Indonesia perwujudan dari pemikiran tersebut sedikit tertunda oleh bencana ‘krisis moneter’ (sejak 1997) yang hingga kini ingin diselesaikan oleh pemerintah antara lain dengan upaya untuk menegakkan wibawa hukum melalui *clean governance* dan berbagai solusi bidang perekonomian yang akan mampu menghela berbagai dimensi kemanusiaan. Kini Malaysia lah yang sangat diharapkan dapat menawarkan berbagai pemikiran yang bisa menerobos berbagai kendala yang menghadang di depan.

Selain itu, pemikiran di kawasan anak benua, India dan Pakistan juga perlu memperoleh sorotan yang proporsional sehingga kita dapat belajar tentang berbagai aspek yang menjadi agenda keummatan. Dua negara ini telah melahirkan putra-putra terbaik seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, M. Muhammad Ali dan Al-Maududi. Abu al-A’la al-Maududi adalah salah seorang pemikir yang banyak memperoleh tempat di hati rakyat Pakistan.

Makalah ini bertujuan untuk membahas berbagai persoalan sekitar latar belakang sejarah (biografi) Al-Maududi yang telah menempa Al-Maududi memiliki corak pemikiran tersendiri; dinamika pemikiran Al-Maududi dalam pergerakan negerinya; politik Islam dalam konsepsi Al-Maududi; serta pesan Al-Maududi kepada kaum muslimin dalam menyongsong abad XXI.

2 Latar Belakang Kehidupannya

2.1 Masa Kecil dan Muda

Abu al - A’la al - Maududi dilahirkan pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H) di Aurangabad, Hyderabad (sekarang termasuk negara bagian Andhra Pradesh, India). Ayahnya adalah Sayid Ahmad Hasan (1855-1919), seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh. Al-Maududi adalah anak terakhir dari tiga bersaudara yang memperoleh pendidikan dasarnya di lingkungan keluarga. Selanjutnya, pada sekolah menengah dia masuk ke sekolah agama yang memadukan antara sistem tradisional dan

modern yaitu pada Madrasah Faqaniyat. Setamat dari sekolah ini ia melanjutkan pelajarannya ke jenjang pendidikan tinggi, Dar al-ulum, di Hyderabad. Namun karena ayahnya wafat, ia tidak berhasil menyelesaikannya. Keadaan ini mendorong Maududi menempuh jalan otodidak. Penguasaannya atas bahasa Arab, Inggris, dan Persia menjadikannya mudah untuk memperdalam pengetahuannya (Nasution [ed.], 1992:632).

Ayahnya termasuk yang pertama masuk Sekolah Tinggi Anglo - Oriental Muslim di Aligarh dan ikut serta dalam eksperimen Sayyid Ahmad Khan dengan modernisme Islam. Akan tetapi, dia tidak lama tinggal di Aligarh. Dia keluar dari sekolah itu dan menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum di Allahabad. Setelah itu, dia tinggal di Deccan, mula-mula di Hyderabad dan kemudian di Aurangabad. Di sana, Ahmad Hasan mulai mengikuti sufisme sehingga untuk beberapa lama mengabaikan karirnya serta mengabdikan dirinya untuk beribadah di tempat suci Nizamudin Auliya di Delhi (Eposito, 2001:13). Semangat puritan dan kecintaannya pada sufisme menciptakan suasana lingkungan yang sangat religius dan zuhud (asketik) bagi pendidikan anak-anaknya. Selain itu, Ahmad Hasan berusaha keras membesarkan anak-anaknya dalam budaya terhormat muslim (syarif) dan mendidik mereka secara klasik, yang dengan sengaja mengeluarkan pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum mereka. Di rumah, mereka diajari bahasa Arab dan Urdu, dan teks-teks keagamaan selama beberapa tahun.

Maududi memulai karirnya di bidang kewartawanan. Sejak 1918, ketika berusia 15 tahun, ia sudah memasuki bidang ini. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*, yang terbit di Jabalpure. Prestasinya memuncak sehingga ia segera diangkat sebagai pimpinan editor di dua surat kabar : *Muslim* (1921-1923) dan *al-Jam'iyat-i 'Ulama-i Hind* (1921-1928). Di tangan al-Maududi surat kabar yang kedua ini menjadi surat kabar Islam yang cukup berpengaruh di India pada dekade 1920-an. Empat tahun berikutnya, 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasikan kebangkitan Islam, *Turjuman al-Qur'an* di Hyderabad.

Di samping itu Maududi muda sangat tertarik dengan dunia politik. Ketertarikannya ini belakangan menjadi sekular dan terfokus hanya kepada nasionalisme. Pada tahun 1918 dan 1919, dia menulis beberapa esai yang memuji para pemimpin Partai Kongres, terutama Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya. Pada 1918 Maududi bergabung dengan saudara laki-lakinya, Abul Khair, di Bijnor dan memulai karir di bidang jurnalistik dan politik. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di

sini Maududi berhadapan dengan berbagai arus intelektual dalam komunitas Muslim.

Pada tahun 1919 dia pindah ke Jabalpur untuk bekerja pada mingguan Taj yang pro-Kongres Khilafat dan memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres.

2.2 Masa Pembentukan Pikiran

Maududi kembali lagi ke Delhi. Di sini dia berkenalan dengan para aktivis penting Gerakan Khilafat, seperti Muhammad Ali. Dengan Muhammad Ali, Maududi sempat bekerjasama untuk waktu yang singkat. Dia melanjutkan ketertarikannya dengan gerakan kemerdekaan, kali ini dari sudut pandang seorang muslim yang makin mengental. Dia sempat bergabung sebentar dengan gerakan protes *Tahrik-i Hijrat* yang mendorong kaum muslim untuk hijrah dari India yang diduduki oleh Inggris (dar al-harb = “daerah perang”) ke Afghanistan yang diperintah oleh orang Islam, yang dianggapnya sebagai “dar ‘l-Islam = negeri Islam”).

Pada 1926 dia menerima ijazah pendidikan agama dan menjadi ulama Deobandi. Namun dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai seorang ‘ulama, dan (ternyata) pendidikannya dalam tradisi Deobandi baru diketahui setelah dia wafat.

Gerakan Khilafat mengalami keruntuhan pada tahun 1924 menjadi titik balik dalam kehidupan Maududi. Dia tidak lagi percaya terhadap nasionalisme, yang diyakininya mengakibatkan rusaknya Persatuan Muslim di Turki dan Mesir. Dia curiga telah terjadi manipulasi sentimen nasionalis oleh Partai Kongres demi kepentingan Hindhu. Secara terbuka dia mengungkapkan kekejian gerakan nasionalis dan sekutu-sekutu Muslimnya. Pada saat itu, dia mendapati dirinya bertentangan dengan Jamiyat dan memutuskan berpisah dengan guru-gurunya di Deobandi karena mereka memilih mendukung Partai Kongres dalam upaya membebaskan India dari Pemerintahan Inggris.

2.3 Al-Maududi dan Dinamika Umat Islam

Revolusi Islam yang berhasil menggulingkan kerajaan Iran pada 1979 merupakan salah satu revolusi rakyat yang pertama dalam perempat terakhir abad kedua puluh melawan sebuah sistem politik otoriter modern. Pada awal 1990-an gerakan Islam lainnya, partai Front Keselamatan Islam (FIS),

ditindas dengan keras setelah secara dramatis mengungguli partai pemerintah otoriter di Al-Jazair. Di berbagai belahan dunia Islam, salah satu isu penting yang menentukan masa depan politik adalah hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan perkembangan sistem politik yang demokratis.

Para pemimpin pemerintahan dan politik di seluruh dunia Islam menanggapi keinginan rakyat ihwal partisipasi politik dan aktivitas keagamaan yang lebih luas itu. Para penguasa dihadapkan pada pilihan antara menindas atau memberi ruang bagi partisipasi rakyat yang lebih besar. Risikonya, jika salah mengambil pilihan, mereka sendiri dapat kehilangan kekuasaan seperti dialami syah Iran atau FLN Al-Jazair.

Ini sebuah dilemma para pemimpin, jika mereka tidak segera menyesuaikan diri dengan tuntutan semacam itu, mereka dapat terguling; namun jika menerapkan sistem politik yang terbuka, mereka menghadapi resiko kalah dalam pemilihan umum. Gerakan-gerakan Islam pun menghadapi pilihan pelik antara menyesuaikan diri atau melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap sistem yang ada. "Pilihan-pilihan itu melibatkan konflik kekuasaan karena antara rezim penguasa dan gerakan oposisi rakyat itu terjalin berbagai relasi yang sangat kompleks" demikian dinyatakan oleh Esposito (1999:2).

Pada abad kedua puluh, gerakan-gerakan Islam mulai bermunculan. Struktur dan pendekatan mereka berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lahir sebelumnya dan ini menandai lahirnya suatu organisasi Islam gaya baru. Ikhwan al-Muslimin, didirikan Hasan al-Banna di Mesir pada 1928, dan Jama'ati Islami, didirikan oleh Abu Al-A'la Al-Maududi di Pakistan tahun 1941, adalah dua contoh terpenting gerakan-gerakan baru itu. Gerakan-gerakan ini tidak mendapat dukungan dari unsur-unsur konservatif dalam masyarakat, tetapi dari kalangan berpendidikan yang bekerja di sektor-sektor modern. Alih-alih menyerukan untuk kembali pada kondisi pramodern, mereka berupaya membangun struktur-struktur Islam secara murni dalam konteks modern. Mereka berhasil mengajak banyak organisasi baru untuk bergabung. Organisasi-organisasi gaya baru ini sangat populer di kalangan mahasiswa dan profesional muda yang berpendidikan modern di berbagai negara muslim. Organisasi-organisasi baru ini berhasil memunculkan dua kecenderungan utama dalam akhir abad kedua puluh : kebangkitan agama dan demokratisasi.

Demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam kerangka sistem negara yang sudah ada. Dengan tingkat pengaruh yang begitu kuat, batasan-batasan politik yang diterapkan oleh politik imprealisme dan nasionalisme

pada paro pertama abad kedua puluh masih sangat mewarnai batasan-batasan politik pada era 1990-an.

Ikhwan Al-Muslimin, misalnya yang berasal dari Mesir, memiliki nama dan tradisi bersama yang melintasi batas-batas suatu negara, namun masih mungkin, bahkan perlu, untuk membahas kekhasan Ikhwan Mesir, Ikhwan Sudan, dan Ikhwan Suriah. Hal serupa berlaku juga bagi Jamaat-i Islami yang berada di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, India atau Kashmir. Meski memiliki pendiri yang mungkin sama, konteks nasional yang khas akan memunculkan perbedaan dalam agenda dan metode diantara gerakan – gerakan Islam baru ini.

W.B. Gallie (1964) menandakan bahwa, “Demokrasi merupakan suatu konsep yang pada prinsipnya masih diperdebatkan”. Pasalnya ada perselisihan pandangan menyangkut konsep-konsep semacam itu yang benar-benar asli dalam arti meskipun tidak dapat diselesaikan dengan argumen apapun, konsep-konsep tetap dipertahankan melalui sejumlah argumen dan bukti-bukti yang sangat dihormati.

Abu Al-A’la Al-Maududi menyatakan bahwa “Sistem politik Islam didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu Tauhid, Risalah dan Khilafah. Maka sulit untuk memahami berbagai aspek pemerintahan Islam tanpa mengerti sepenuhnya ketiga prinsip ini.

Esposito (1999:240) menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan kerusuhan oleh kelompok minoritas militan vokal dan pembunuhan sadar telah menghambat atau mematikan tumbuhnya suatu alternatif Islam yang mempunyai basis lebih luas, suatu “revolusi diam” atau “revolusi tenang”. Lapangnya ruang gerak pada tahun-tahun awal kekuasaan Mubarak telah memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dan sosial tumbuh lebih cepat, memperluas lembaga-lembaganya, dan menjadi bagian dari masyarakat arus utama. Ini telah mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan beragama, sehingga tampak jelas di hampir seluruh lapisan masyarakat dan bahkan menjadi norma dan melembaga, seperti yang tampak dari kesalehan pribadi, tumbuhnya mistisisme sufi, berkembangnya lembaga-lembaga Islam (bank, lembaga investasi, asuransi, dll), dan pelayanan kesejahteraan sosial, penerbitan-penerbitan, serta media.

3. Pemikiran Politik Islam Al-Maududi

Abu A’la al-Maududi adalah ulama dan pemikir Islam abad kedua puluh yang sangat dihormati dan berpengaruh. Ia terkenal dengan

konsistensi pemikirannya yang melihat Islam sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dan harus diterapkan oleh umat Islam. Pemikir asal India ini juga seorang intelektual cemerlang dengan bakat besar dalam menuliskan pemikirannya. Kemampuannya ini ditambah dengan keterampilannya dalam berorganisasi dan model kepemimpinannya yang kharismatik.

Maududi memandang, negara Islam adalah suatu yang mutlak diperlukan. Menurutnya, ajaran Islam yang serba mencakup tidak dapat dipraktekkan tanpa adanya negara Islam, sebab negara memiliki otoritas dan kekuasaan politik yang diperlukan untuk merealisasikan ajaran agama (Madjid, t.th:41). Untuk itu, umat Islam harus berjuang meraih kendali alat-alat negara, karena itu merupakan prasyarat agar manusia dapat mematuhi hukum Tuhan. Bagi al-Maududi, niat mencari kekuasaan dalam rangka menegakkan agama Tuhan adalah amal saleh dan jangan dicampur adukkan dengan ambisi kekuasaan.

Secara garis besar Al-Maududi memiliki beberapa ajaran yang bersinggungan dengan kehidupan Islam umat dan negara. Namun semua itu dapat dilukiskan sebagai berikut :

- a. nilai – nilai demokratis dalam Islam tidak bersifat mutlak milik manusia.
- b. teori politik Islam sangat mengecam sistem kerajaan.

3.1 Demokrasi dalam Konsepsi Al-Maududi

Dalam pandangan Al-Maududi (dalam Ahmad, 1982:179) Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan satu sama lain dan tatacara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Karena itu segi apapun dari ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu mestilah kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu :

- 1) Tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya.
- 2) Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya.

Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya.

- 3) Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat. (dalam Ahmad, [Sic!], 1982:193).

Nama yang tepat untuk negara Islam adalah ‘kerajaan Allah’ (Inggris:Theokrasi). Tetapi theokrasi Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari theokrasi yang telah memberikan pengalaman pahit bagi dunia Eropa, karena di sana para pendeta itulah yang mendominasi dan memaksakan hukum-hukum buaatannya sendiri kepada masyarakat atas nama Tuhan. Dengan demikian sama saja dengan memaksakan ketuhanannya sendiri terhadap rakyat banyak. Disamping itu, memang dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut “*rijaluddin*”. Karena itu dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi dominasi ulama (kaum cendekiawan muslim) terhadap pikiran-pikiran dan keyakinan ummat (As-Sibai, 1983:109).

Al-Maududi memperkenalkan istilah “*thedemokrasi*” yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah (dalam Khursid Ahmad, 1982:195, dan Maududi, 1996:130).

Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya (Al-Maududi,1980:87). Dan meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi Al-Maududi menyatakan :

“Syariat ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun berdasarkan adat sesuatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahkan ia disusun diatas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap masa atau suasana”.

Pandangan Al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua ummat manusia dimana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka

semuanya akan membawa kerusakan ummat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran Islam semakin banyak dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan teknologi Barat dan kearifan Timur. Hal seperti ini sejak semula telah ada dalam firman Allah SWT :

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri (Q.S. 41 : 52)

3.2 Pesan Al-Maududi untuk Muslim Abad XXI

Apa yang diwariskan oleh Maududi adalah satu konsep pemikiran yang diaplikasikan oleh umat Islam sekurang-kurangnya melalui Jemaat Islami. Dalam “Jemaat Islami” inilah Al-Maududi mengartikulasikan ajarannya. Satu hal lain yang sangat perlu dicatat disini, bahwa dua ideologi Barat terbesar, yaitu kapitalisme dan sosialisme mencerminkan kegagalan moral dan sosial manusia, sementara itu Islam merupakan alternatif sempurna. Karena itu, perjuangan untuk mencapai tujuan ini harus menjadi sasaran utama seluruh umat muslim. (Madjid, t.th.:41). Di sini akan bertemu antara kelompok aktivis pergerakan dengan para pendukung kemapanan peradaban modern.

Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun ideologi komunisme telah mengalami kebangkrutan, sosialisme telah mengubah dirinya dengan satu metamorfose ajaran kritis yang kemudian dikenal dengan “jalan tengah (*third way*)” (Gidden, 2001).

4 Penutup

Demikianlah pemikiran Al-Maududi tentang demokrasi Islam dalam konteks pencarian format negara Islam yang hingga kini pijar-pijarnya masih hidup di Negara Islam Pakistan. Dinamika masyarakat Pakistan akan selalu menemukan inti pemikiran Al-Maududi dan mencari aktualisasinya.

Di samping itu Al-Maududi mengancam pula Kapitalisme Barat, karena ini akan mendatangkan banyak bencana bagi negara Islam, lebih-lebih masyarakat muslim akan selalu mencari kiprah untuk lepas dari kondisi ketergantungan pada modal Barat yang eksploitatif tersebut, dan untuk selanjutnya diterapkanlah sistem ekonomi Islam yang akan membawa *rahmatan lil-‘alamien*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khursid, 1982, *Islam : Its Meaning and Message*, (Terj. Ahsin Muhammad), Bandung, Pustaka Salaman ITB.
- Al-Maududy, Abu 'l-A'la, 1977, *Mabadiu 'l - Islam*, Damaskus, Daru 'l-Qur'an al-Karim.
- , 1996, *Khilafah dan Kerajaan*, (Pengantar : Dr. M. Amin Rais) Bandung, Mizan.
- Al-Siba'i, Mustofa, 1983, *Agama dan Negara: Studi Perbandingan Antara Yahudi, Kristen dan Islam*, Jakarta, Media Dakwah.
- , 1985, *al-Sirah al-Nabawiyah : Durus wa 'ibar*, (terj. Nabhan Husein), IIFSO, Jakarta.
- Audah, Abdul Kadir, 1978, *al-Islam wa audla'una al-Qanuniyah*, Daru 'l-Qur'an al-Karim, Beirut.
- Esposito, John L., 2001, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung, Mizan.
- Esposito, John L dan John O. Voll, 1999, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Bandung, Mizan.
- W.B. Gillie, 1964, *Philosophy and the Historical Understanding*, London, Chatto and Windus, hlm. 158.
- Madjid, Nurcholis, t.th., *Ensiklopedia Islam untuk Pelajar*, (jilid 4), Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Nasr, Seyyed Hossein, 1975, *Islam and The Plight of Modern Man* (terj. Anas Mahyudin), Pustaka Salman ITB, Bandung.
- Nasution, Harun (editor), 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1994, *Fiqh Siyasa : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali Pers.